**PELAKSANAAN KETENTUAN PASAL 1278 KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA PADA PERJANJIAN
PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI MEKAAR
SYARIAH KANTOR CABANG MANONJAYA 2**

Siti Hasanah *)

siti_hasanah00@student.unigal.ac.id

Alis Yulia *)

alis_yulia80@unigal.ac.id

Hendra Sukarman *)

hendrasoek1974@unigal.ac.id

ABSTRACT

Humans are social beings who cannot live alone without the help of others, where each individual has interests concerning other individuals from the beginning to the end of their lives. Borrowing and lending money have been activities carried out for a long time in society. It is known that the majority of society has made borrowing and lending money activities a very necessary thing to support the economy and to improve the standard of living. The problems in this study are identified as follows: how the implementation, obstacles, and efforts in implementing the provisions of Article 1278 of the Civil Code in the agreement of PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Manonjaya 2 Branch Office. The approach method used in this study is "descriptive analytical," which is a way to solve problems or answer issues that are being faced, carried out by collecting data, classifying data, analyzing data, and concluding with the aim of creating an objective description of a situation. The research is also continued with the approach of the Normative Juridical research method, which is a research method carried out by taking material from an event to be analyzed and connected with the applicable laws and regulations. Based on the conducted research, the implementation of the provisions of Article 1278 of the Civil Code in the agreement of PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Manonjaya 2 Branch Office still has customers who have difficulty paying installments so that they have to be jointly borne by other group members. However, frequently covering customers' installments makes other group members uneasy. In implementation, there are several obstacles, including customers who do not attend regular meetings so that their installments do not come in. Additionally, there is the obstacle of a lack of good faith from customers who have been jointly borne by their group mates; instead, the customers themselves feel complacent. The author's suggestion in this study is that the officers of PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Manonjaya 2 Branch Office should emphasize

*) Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Galuh

*) Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

*) Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

to the customers the importance of making their installment payments smoothly every week. Furthermore, socialization should be conducted to the community, especially those who are customers of PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Manonjaya 2 Branch Office, regarding the necessity of fulfilling the agreed-upon obligations in debt agreements from the outset.

Keywords: *Agreement, Lending and Borrowing, Loan Installments*

ABSTRAK

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, dimana setiap individu tersebut mempunyai kepentingan terhadap individu yang lain dari awal hingga akhir hidupnya. Pinjam meminjam uang telah menjadi kegiatan yang dilakukan sejak lama dalam kehidupan masyarakat. Diketahui mayoritas masyarakat telah menjadikan kegiatan pinjam meminjam uang sebagai hal yang sangat diperlukan untuk mendukung perekonomian dan untuk meningkatkan taraf hidup. Adapun permasalahan dalam penelitian ini diidentifikasi sebagai berikut: bagaimanakah pelaksanaan, kendala dan upaya dalam pelaksanaan ketentuan Pasal 1278 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada perjanjian PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Kantor Cabang Manonjaya 2. Sedangkan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan “deskriptif analitis”, yaitu cara untuk memecahkan masalah atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi, dilakukan dengan menempuh jalan pengumpulan data, klasifikasi data, analisis data yang disimpulkan dengan tujuan untuk membuat gambaran tentang suatu keadaan secara objektif. Penelitian juga dilanjutkan dengan pendekatan metode penelitian Yuridis Normatif yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengambil bahan dari satu peristiwa untuk dianalisa dan dihubungkan dengan Perundang-Undangan yang berlaku. Berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa pelaksanaan ketentuan Pasal 1278 Kitab undang-undang Hukum Perdata pada perjanjian PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Kantor Cabang Manonjaya 2 bahwasannya masih saja ada nasabah yang sulit membayar angsuran sehingga harus di tanggung renteng oleh anggota kelompok lainnya, tetapi seringkali menalangi angsuran nasabah membuat anggota kelompok lainnya resah. Pada pelaksanaan terdapat beberapa kendala diantaranya nasabah yang tidak hadir pada perkumpulan rutin sehingga angsurannya tidak masuk, selain itu kendalanya juga tidak adanya itikad baik dari nasabah yang sudah di tanggung renteng oleh rekan kelompoknya, malah nasabah itu sendiri merasa keenanakan. Saran penulis dalam penelitian ini, petugas PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Kantor Cabang Manonjaya 2 lebih menegaskan kembali kepada nasabah terkait pembayaran angsuran yang harus lancar setiap minggu nya. Selain itu diadakannya sosialisasi kepada masyarakat terutama yang menjadi nasabah PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Kantor Cabang Manonjaya 2 bahwasannya dalam Perjanjian utang piutang harus memenuhi prestasi yang telah disepakati di awal.

Kata kunci: Perjanjian, Pinjam Meminjam, Angsuran Pinjaman

I. Pendahuluan

Pinjam meminjam uang telah menjadi kegiatan yang dilakukan sejak lama dalam kehidupan masyarakat. Diketahui mayoritas masyarakat telah menjadikan kegiatan pinjam meminjam uang sebagai hal yang sangat diperlukan untuk mendukung perekonomian dan untuk meningkatkan taraf hidup. Pihak pemberi pinjaman mempunyai kelebihan ekonomi bersedia

memberikan pinjaman kepada yang memerlukannya. Sebaliknya pihak peminjam berdasarkan keperluan atau tujuan tertentu melakukan peminjaman uang tersebut. Dapat dikatakan bahwa pihak peminjam meminjamkan uang kepada pihak pemberi pinjaman untuk membiayai kebutuhan kehidupan sehari-hari atau untuk memenuhi keperluan dana guna pembiayaan kegiatan usahanya. PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah yang sering disebut dengan istilah Bank Emok, PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah merupakan layanan pemberdayaan berbasis kelompok sesuai ketentuan hukum Islam yang berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang ditujukan bagi perempuan pra-sejahtera pelaku usaha ultra mikro. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 1 Juni 1999 dan bertujuan membantu pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi.

Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah menyediakan layanan pinjaman modal untuk perempuan prasejahtera pelaku usaha Ultra Mikro melalui program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera. Nasabah Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah memiliki pengetahuan dan ketrampilan dalam berusaha, namun terbatasnya akses pembiayaan modal kerja menyebabkan keterampilan berusaha mereka kurang termanfaatkan. Oleh karena itu, PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah dikuatkan dengan aktivitas pendampingan usaha dan dilakukan secara kelompok. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang ketua dan mengadakan Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM) wajib dilaksanakan satu kali dalam seminggu, sebagai kegiatan untuk membayar angsuran mingguan dan pembinaan usaha dan Pembiayaan PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah tidak mensyaratkan agunan fisik, melainkan bersifat tanggung renteng kelompok, dengan syarat kedisiplinan untuk mengikuti proses persiapan pembiayaan dan Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM).¹⁾

Dalam Pelaksanaan pinjam meminjam uang tidak luput dengan perjanjian. Perjanjian adalah semata-mata untuk suatu persetujuan yang diakui oleh hukum. Persetujuan ini merupakan kepentingan yang pokok di

¹⁾ PT. Permodalan Nasional Madani.2023. *PNM Mekar dan PNM Mekar Syariah*. Diakses tanggal 21 Februari 2024 Doi:<https://www.pnm.co.id/business/pnm-mekar>.

dalam dunia usaha dan menjadi dasar bagi kebanyakan transaksi dagang seperti jual beli barang, tanah, dan khususnya dan pemberian kredit.²⁾ Suatu perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu sepakat, kecakapan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.

Semua subjek hukum baik manusia atau badan hukum dapat membuat suatu persetujuan yang menimbulkan perikatan diantara pihak-pihak yang membuat persetujuan tersebut. Persetujuan ini mempunyai kekuatan yang melakukan perjanjian tersebut sebagai mana yang diatur di dalam pasal 1338 KUHPerdata.

Asas yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata ini, yang mengatakan bahwa: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”.³⁾

Dalam hal peminjaman, peminjaman erat kaitannya dengan akad atau perjanjian. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Pelaksanaan perjanjian tersebut tidak luput dari adanya wanprestasi atau kelalaian dari salah satu pihak, dapat dari pembeli dan dapat pula dari penjual. Apabila hal ini terjadi tentunya harus ada penyelesaian dari kedua belah pihak, karena masing-masing mempunyai hak dan kewajiban. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.⁴⁾

Pelaksanaan Ketentuan Pasal 1278 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pada PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Cabang Manonjaya 2. Ada sebagian kasus yang terjadi di Desa Cilangkap di PT.

²⁾ Abdulkadir Muhammad. 2013. *Hukum Perjanjian*. Bandung: PT Alumni. hlm. 93.

³⁾ J.Satrio. 2018. *Pelaksanaan Suatu Perjanjian*. Hukum Online.com, Diakses 21 Februari 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pelaksanaan-suatu-perjanjian-lt5a5c2fbdae8c4>.

⁴⁾ Salim HS. 2008. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 180

Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Cabang Manonjaya 2, yang bernama Ibu Ajeng Sringing Ayu, ibu tersebut awalnya meminjam uang kepada PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Mekaar Syariah dan menjadi anggota kelompok, pada awalnya ibu Ajeng Sringing Ayu membayar dengan lancar dan selalu datang dalam pertemuan tiap minggu nya, tetapi memasuki angsuran ke 15 Ibu tersebut tidak datang dalam pertemuan tiap minggu nya dan tidak membayar angsuran, oleh karena itu setiap wajib anggota kelompoknya harus menanggung semua angsuran Ibu Ajeng Sringing Ayu dengan sistem tanggung renteng sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian di awal yang sudah disepakati oleh setiap anggota kelompoknya.

Tetapi dalam kenyataannya pihak kelompok tersebut tidak melaksanakan kewajibannya atau tidak memenuhi perjanjian yang telah disepakati, karena Ibu Ajeng Sringing Ayu tidak datang dalam pertemuan tiap minggu dan tidak membayar angsurannya hingga saat ini. Oleh karena itu terjadilah wanprestasi karena tidak memenuhinya perjanjian yang telah disepakati.

II. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, menurut Adiputra et al., Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena yang ada, yaitu fenomena alam atau fenomena buatan manusia, atau yang digunakan untuk menganalisis atau mendeskripsikan hasil subjek, tetapi tidak dimaksudkan untuk memberikan implikasi yang lebih luas.⁵⁾

Penelitian ini di laksanakan dengan pendekatan yuridis normatif menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran

⁵⁾ Tia Nadila dan Nuslih Jamiat.(2023). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Kepuasan Pelanggan Terhadap Loyalitas Pelanggan Pada Jasa Pos Logistik Palembang.*Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi Vol. 10 No. 3. Diakses 21 Februari 2024. Doi: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jmbi/article/view/51708>.

terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁶⁾

Dalam mengumpulkan bahan-bahan dan data-data, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*), yaitu mengumpulkan data-data dan bahan yang meliputi:
 - a. Bahan Hukum Sekunder Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis yang terdiri dari: perundang-undangan, hasil karya ilmiah sarjana, hasil penelitian yang ada relevansinya, buku literatur, karya ilmiah.
 - b. Bahan Hukum Tersier Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder terdiri dari kamus hukum, ensiklopedia, internet, jurnal, dan lain-lain.
2. Studi Lapangan (*Field Research*), yaitu terdiri dari sebagai berikut:
 - a. Observasi, yaitu penelitian yang dilakukan melalui pengamatan langsung, mempelajari kegiatan, pengamatan cermat, pengumpulan berupa data-data serta fakta yang terjadi yang berkaitan dengan permasalahan yang berkaitan langsung di lapangan atau lokasi penelitian mengenai Pelaksanaan Ketentuan Pasal 1278 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pada Perjanjian PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Kantor Cabang Manonjaya 2.
 - b. Wawancara (*Interview*), yaitu metode proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik yaitu pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang dihadapi.

Penelitian dilakukan pada PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Kantor Cabang Manonjaya 2, Desa Cilangkap, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat

⁶⁾ Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, (2001), *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 13-14.

III. Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan Ketentuan Pasal 1278 Kitab Undang Undang Hukum Perdata Pada Perjanjian PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Kantor Cabang Manonjaya yaitu jadi PT. Permodalan Nasional Madani itu Praktek hutang piutang yang sudah dilakukan kurang lebih selama 5 tahun dan sudah memiliki 350 kelompok yang memiliki anggota masing– masing 10 sampai 15orang yang anggotanya keseluruhan dari kalangan ibu-ibu rumah tangga. Praktek hutang piutang ini dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga dengan pembayaran menggunakan Sistem Tanggung Renteng, Berdasarkan hasil penelitian dengan Ibu Nola selaku *account officer*, praktek pembayaran hutang dengan Sistem Tanggung Renteng ini diprioritaskan dan dianjurkan hanya untuk yang perekonomiannya menengah ke bawah, Pembayaran hutang dilakukan dengan Sistem kelompok yang angsurannya dilakukan selama seminggu sekali dengan nominal masing-masing sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per anggota di dalam satu kelompok. Jika dalam kelompok tersebut ada salah satu anggota yang tidak hadir dan tidak membayar di waktu pembayaran angsuran maka anggota lain dalam kelompok tersebut berkewajiban menalangi atau membayar tagihan anggota yang tidak hadir tersebut, dengan cara Rp. 50.000 dibagi 10 orang (anggota kelompok) nya jadi Rp. 5000-. perorangannya harus membayar dan anggota tersebut untuk minggu selanjutnya harus membayar hutang yang sudah di talang dengan anggota lain.

Pelaksanaan Ketentuan Pasal 1278 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pada Perjanjian PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Kantor Cabang Manonjaya 2 belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PT. Pemodalan Nasional Madani sudah berjalan kurang lebih selama 5 tahun dan sudah memiliki 350 kelompok yang memiliki anggota masing-masing 10 sampai 15 orang yang anggotanya terdiri ibu-ibu. Utang piutang ini dilakukan dengan menggunakan sistem tanggung renteng. Pembayaran utang piutang dilakukan dengan sistem kelompok yang angsurannya dilakukan selama seminggu sekali dengan nominal masing-masing Rp. 50.000-, (lima puluh ribu rupiah) per anggota di dalam satu

kelompok. Jika dalam satu kelompok tersebut ada salah satu anggota yang tidak hadir dan tidak membayar di waktu pembayaran angsuran maka anggota lain dalam kelompok tersebut berkewajiban untuk membayar tagihan anggota yang tidak hadir dan tidak membayar angsuran dengan cara Rp. 50.000-, (lima puluh ribu rupiah) dibagi 10 Orang (anggota kelompok) yaitu sebesar Rp. 5000-, (lima ribu rupiah) per orangnya. Tetapi dalam kenyataannya masih belum berjalan secara peraturan yang berlaku seperti nasabah yang tidak datang ke dalam pertemuan mingguan, tidak bayar angsuran dengan tepat waktu sehingga angsurannya harus di tanggung renteng oleh nasabah kelompok tersebut.

Terdapat beberapa kendala dalam Pelaksanaan Ketentuan Pasal 1278 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pada Perjanjian PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Kantor Cabang Manonjaya 2, yaitu:

a. Nasabah tidak memenuhi angsurannya

Pembayaran angsuran merupakan kewajiban nasabah untuk membayarnya tiap minggu pada perkumpulan kelompok, tetapi tak jarang ada saja nasabah yang tidak lancar memenuhi angsuran setiap minggunya dan dengan terpaksa anggota nasabah lain harus tanggung renteng sesuai dengan kesepakatan kelompok. Pelaksanaan tanggung renteng tersebut masing- masing dimintai Rp. 5.000 per nasabah sehingga dalam satu kelompok terkumpul Rp. 50.000 untuk memenuhi angsuran salah satu nasabah, tidak sedikit anggota kelompok yang mengeluh karena harus terus terusan menalangi angsuran nasabah yang tidak bayar pada pertemuan mingguan rutin tersebut.

b. Nasabah Tidak Hadir Dalam Pertemuan

Kelompok Setiap minggu selalu diadakannya pertemuan rutin kelompok nasabah dengan tujuan untuk para nasabah membayar angsurannya, di minggu ke 1 sampai minggu ke 15 seluruh nasabah selalu hadir pada pertemuan rutin tersebut tetapi ke minggu berikutnya selalu ada saja nasabah yang tidak hadir pada pertemuan rutin. Tidak hadirnya nasabah pada pertemuan rutin menyebabkan pembayaran angsurannya pun tidak ada, sehingga anggota lain yang hadir harus menalangi pembayaran

nasabah yang tidak hadir di pertemuan. Anggota nasabah yang tidak hadir dan tidak memberikan alasan mengapa tidak datang dan tidak memberikan angsuran, hal tersebut membuat anggota nasabah lainnya geram karena harus terus terusan menalangi angsuran nasabah tersebut.

c. Tidak adanya Itikad Baik

Dalam melakukan perjanjian antara nasabah dengan PT. PNM, apabila itikad baik tidak dimiliki oleh para pihak nasabah maka hubungan hukum yang dibuat tidak akan mencapai tujuan sebagaimana mestinya. Dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik” asas itikad baik ini sangat mendasar dan penting untuk diperhatikan terutama di dalam membuat perjanjian, maksud itikad baik disini adalah bertindak sebagai pribadi yang baik. Itikad baik dalam pengertian yang sangat subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang. Sedangkan itikad baik obyektif yaitu bahwa pelaksanaan suatu perjanjian itu harus didasarkan pada norma kepatutan atau apa-apa yang dirasa sesuai dengan yang patut dalam masyarakat. Dalam hubungan hukum perjanjian antara nasabah dan PT. Permodalan Nasional Madani terkadang dapat menyebabkan wanprestasi akibat nasabah tidak memenuhi prestasinya yaitu membayar angsuran mingguan sesuai dengan yang telah disepakati di awal.

Upaya yang dapat dilakukan PT. Permodalan Nasional Madani dalam Pelaksanaan Ketentuan Pasal 1278 Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada perjanjian PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Kantor Cabang Manonjaya 2, yaitu:

a. Setiap nasabah diberi 4 kali kesempatan ditanggung renteng

Tidak lancarnya angsuran nasabah yang menyebabkan pembayaran angsurannya harus ditanggung renteng oleh seluruh anggota kelompok, salah satu anggota yang sering tidak hadir pada perkumpulan dan karena itu tidak masuknya angsuran setiap minggunya. Karena keseringan ditanggung renteng banyak anggota kelompok yang mengeluh

karena terlalu sering menalangi pembayaran angsuran rekan kelompoknya.

Agar nasabah yang sulit membayar angsuran tidak merasa keenanakan maka petugas PT. Permodalan Nasional Madani memberikan 4 kali kesempatan untuk dibantu oleh anggota lain, jika lebih dari 4 kali maka petugas PT. Permodalan Nasional Madani akan memberikan ketegasan kepada nasabahnya.

b. Negosiasi kepada Nasabah

Melakukan negosiasi kepada nasabah dimintai kesanggupan atas hutang yang telah di perbuat, jika nasabah tersebut benar-benar tidak sanggup membayar, maka dari pihak PT. Permodalan Nasional Madani memberikan keringanan untuk membayar semampunya saja, jadi tidak menyangkut ke anggota kelompok lagi sampai nasabah tersebut bangkit lagi dari kebangkrutan. Jika usahanya sudah mulai bangkit lagi, maka biasanya diberikan tawaran yang namanya reschedule yang artinya mengulang jadwal untuk memperkecil angsuran nasabah tersebut yang tadinya Rp. 50.000-. menjadi Rp. 25.000-. dengan cara tersebut kebanyakan nasabah menerima tawaran nya dan menyanggupi untuk membayar angsuran tersebut.

c. Sosialisasi

Nasabah PT. Permodalan Nasional Madani sebagian besar adalah ibu-ibu masyarakat desa, kurangnya pengetahuan masyarakat terutama ibu-ibu yang menjadi nasabah mengenai perjanjian utang piutang yang tidak diperbolehkan dalam aturan yang berlaku. Perlunya sosialisasi kepada masyarakat terutama nasabah PT. Permodalan Nasional Madani mengenai adanya Pasal 1278 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan ketentuan Pasal 1278 Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada Perjanjian PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Kantor Cabang Manonjaya 2 yaitu dengan mensosialisasikannya kepada masyarakat terutama yang menjadi nasabah bahwasannya dalam

Perjanjian utang piutang harus memenuhi prestasi yang telah disepakati di awal.

IV. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang penulis uraikan dalam bab-bab sebelumnya maka dengan ini simpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Ketentuan Pasal 1278 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pada Perjanjian PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Kantor Cabang Manonjaya 2, secara umum tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kendala-kendala dalam pelaksanaan ketentuan Pasal 1278 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata pada perjanjian PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Kantor Cabang Manonjaya 2, diantaranya Nasabah tidak memenuhi angsurannya sehingga anggota kelompok lainnya harus tanggung renteng untuk memenuhi angsuran nasabah tersebut. Selain itu, kendala dalam Pelaksanaan Ketentuan Pasal 1278 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Pada Perjanjian PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Kantor Cabang Manonjaya 2, yaitu Nasabah tidak hadir pada pertemuan rutin setiap minggu, nasabah yang tidak hadir sudah pasti tidak membayar angsuran lagi karena itu harus dilakukan tanggung renteng oleh anggota kelompok lain untuk membayar angsuran nasabah yang tidak hadir. Tidak adanya itikad baik juga menjadi salah satu kendala pada Pelaksanaan Ketentuan Pasal 1278 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pada Perjanjian PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Kantor Cabang Manonjaya 2, karena tidak adanya itikad baik dari nasabah yang tidak membayar karena anggota kelompok sudah memberikan keringanan dengan dibantu ditanggung renteng, tetapi malah keenanakan dan tidak ada itikad baik untuk memperbaiki pembayaran ke depannya.
3. Bahwa upaya-upaya yang dilakukan ada beberapa cara antara lain dengan memberikan 4 kali kesempatan untuk ditanggung renteng

oleh anggota kelompoknya dan jika nasabah lebih dari 4 kali tidak membayar angsuran maka petugas PT. Permodalan Nasional Madani akan memberikan ketegasan. Selain itu, upaya yang dilakukan yaitu negosiasi dengan nasabah terkait kesanggupan membayar hutang yang telah diperbuat, dan apabila tidak sanggup dengan pembayarannya maka akan di reschedule atau diperkecil cicilannya. Upaya yang dapat dilakukan lagi yaitu dengan sosialisasi kepada masyarakat terutama yang menjadi nasabah mengenai adanya Pasal 1278 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

4.2. Saran

1. Meningkatkan ketegasan dan melaksanakan peraturan-peraturan yang sudah dibuat sebelumnya dari petugas PT. Permodalan Nasional Madani kepada nasabah dalam melakukan pembayaran angsuran setiap minggu sebagaimana yang telah disepakati di awal.
2. Memperketat nasabah dalam pertemuan tiap minggu dan pembayaran harus tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku agar tidak terus-menerus melakukan tanggung renteng karena merugikan nasabah lainnya.
3. Kepada petugas PT. Permodalan Nasional Madani agar melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar angsuran mingguan secara tepat waktu sesuai dengan perjanjian awal

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra AdityaBakti.
- _____. 2004. *Hukum Perjanjian*. Bandung: PT Alumni.
- _____. 2013. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- _____. 2013. *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____. 2014. *Hukum Perjanjian*. Bandung: PT Citra Aditya Abadi.
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati. 2008. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Ahmadi Miru. 2007. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: RajawaliPers.
- _____.2012. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dendy Sugono. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Djaja Meliana. 2012. *Hukum Perdata dalam Perspektif (BW)*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Herlien Budiono. 2014. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya.
- H. R Daeng Naja.2009. *Pengantar Hukum Bisnis Indonesia*. Bandung: P.T Cipta Aditya
- Bakti. I Ketut Okta Setiawan. 2016. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- J.Satrio. 2015. *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. (2010). *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Munir Fuady. 2012. *Hukum Perjanjian, dari sudut pandang hukum bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- R. Setiawan. 2018 . *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Bina Cipta.
- R.Subekti. 2007. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Arga Printing.
- _____.2012. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa
- Salim HS. 2008. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika
- _____.2014. *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syahmin. 2011. *Hukum Kontrak Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto. 2003. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Suharmoko dan Ahmadi Miru. 2015. *Hukum Perdata: Materiil dan Formil*. Jakarta: The Asia Foundation.
- Sri Soesilawati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif, dan Akhmad Budi Cahyono. (2015). *Hukum Perdata Suatu Pengantar* . Jakarta: Gitama Jaya.
- Sudikno Mertokusumo.2015. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

B. Jurnal Online:

- Abdul Halim, Barkatullah. 2009. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-commerce Lintas Negara Di Indonesia*. Yogyakarta: Pasca Sarjana FH UII. Doi: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20435516&lokasi=lokal>.
- Henni Muchtar. 2015. Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah dengan Hak Asasi manusia. *Jurnal Humanis*. Vol. XIV No.1 Th. 2015.Doi: <https://media.neliti.com/mediaanalisis-yuridis/ac.id>.

- J. Satrio. 2018. *Pelaksanaan Suatu Perjanjian*. Hukum Online.com. Doi: <https://www.hukumonline.com/berita/a/pelaksanaan-suatuperjanjian-1t5a5c2fbdae8c4>.
- Mardliyyah, A dan Ryandono, M. N. H.(2020). *Sistem Tanggung Renteng Pada Koperasi Assakinah Sebagai Bentuk Penerapan Ta'Awun*. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*,7(2),254. Doi: <https://doi.org/10.20473/vol7iss20202pp254-268>.
- Nanda Amalia.2012. *Hukum Perikatan*. Aceh: Unimal Press. hlm. 2. Doi: <http://repository.umsu.ac.id/jspui/handle/123456789/15290>.
- Tia Nadila dan Nuslih Jamiat. (2023). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Kepuasan Pelanggan Terhadap Loyalitas Pelanggan Pada Jasa Pos Logistik Palembang*. *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Samratulangi* Vol. 10 No. 3. Doi: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jmbi/article/view/51708>.
- Udin Saripudin. 2013. Sistem Tanggung Renteng dalam PerspektifEkonomi Islam. *Iqtishadia*, Vol. 6 (2), 386. Doi: <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/IQTISHADIA/article/download/1101/1030https://www.pnm.co.id/business/pnmmekar>.